



**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
KETERANDALAN LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

Oleh
Rian Oktavianie ¹

ryanoctavianie@gmail.com

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNMURA

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of information technology utilization, to the reability financial reporting on regional development organizations in Musi Rawas disctrict. Population in this study was the unit work of financial managers in the in musu rawas disctrict.

The sampling technique used was purposive sampling method that produces 70 financial managers officer. The data were obtained through a questionnaire. Variables in this research is the independent variable (independent) information technology utilization (X) while the variable (dependent) is the reability financial reporting (Y). Data were analyzed by using multiple linear regression analysis (multiple regretion) with programme SPSS 23.

The results showed that the information technology utilization do not have effects against on to the reability financial reporting.

Keywords: information technology, reability, financial reporting

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah kabupaten Musi Rawas. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian pengelola keuangan pada organisasi perangkat daerah kabupaten musu rawas.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan metode *purposive sampling* yang menghasilkan 70 petugas pengelola keuangan. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas (*independent*) pemanfaatan teknologi informasi (X) sedangkan variabel terikatnya (*dependent*) adalah keterandalan laporan keuangan (Y). Data dianalisis dengan menggunakan analisa regresi linear berganda (*multiple regretion*) dengan program SPSS 23.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah kabupaten Musi Rawas.

Kata kunci teknologi informasi, keterandalan, laporan keuangan

I. Pendahuluan

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji, mengingat semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Salah satu bentuk transparansi pemerintah atas pengelolaan keuangan publik adalah pembuatan laporan keuangan. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintahan, masih banyak disajikan data yang tidak sesuai yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya guna menegakkan akuntabilitas khususnya pada kinerja finansial di daerah. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajibanmempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Banyak temuan yang ditemukan pada pengelolaan keuangan yang disajikan oleh penyusun laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran merupakan rencana kerja suatu instansi termasuk pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah). Setiap pengguna anggaran harus mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelolanya. Begitu juga pemerintah daerah wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Dimensi akuntabilitas publik salah satunya adalah akuntabilitas finansial, dalam menegakkan akuntabilitas finansial pemerintah daerah memiliki tanggungjawab mempublikasikan laporan keuangan daerah kepada *stakeholder* (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Setiap aspek organisasi dari bisnis, industri, pendidikan dan instansi pemerintah akan tersentuh oleh teknologi informasi untuk mempermudah penyelesaian dalam tugas pekerjaan. Kebutuhan akan informasi yang berkualitas bagi seorang manajemen dunia usaha pada masa sekarang ini mendorong pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, barang dan jasa yang dihasilkan serta pemanfaatan teknologi informasi yang efektif melalui sistem informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi mungkin mempengaruhi kualitas pada pelaporan keuangan entitas akuntansi. Teknologi merupakan media yang dipakai untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan setiap individu. Secara umum suatu teknologi informasi dapat memberikan banyak manfaat dalam membantu individu menyelesaikan tugas-tugasnya antara lain transaksi yang diproses dengan cepat, penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, data yang dapat disimpan dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2003).

Oleh karena itu, bagi pemerintah pusat dan daerah teknologi sangat penting dalam membantu pejabat pengelola keuangan SKPD maupun PPKD dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual dengan efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi seringkali ditemui kendala. Kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi meliputi, kondisi perangkat keras (*hardware*) yang memerlukan biaya dalam perawatannya, dan kondisi perangkat lunak (*software*) memerlukan biaya yang tidak sedikit dikarenakan membeli secara legal, serta kondisi penggunaannya yaitu sumber daya manusia (*brainware*)

Laporan keuangan yang berkualitas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Relevan yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami dalam artian dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. (PP 71, Tahun 2010).

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pengaruh teknologi informasi terhadap keterandalan laporan keuangan yaitu menurut Jurnal dan Supomo (2002) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan berpengaruh terhadap perilaku berkaitan dengan penggunaan teknologi tersebut dalam menyelesaikan

tugas. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi akan berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Darwanis dan Mahyani, 2009). Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan (Karmila dkk, 2014). Hasil penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya adalah penelitian Prapto, (2010) yang menemukan bukti empiris bahwa Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pada hasil penelitian yang lain mengatakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, karena teknologi informasi yang tidak atau belum dimanfaatkan secara optimal, kurangnya ketersediaan komputer yang memadai, penggunaan jaringan internet yang belum optimal, serta pengimplementasian teknologi informasi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga implementasi teknologi informasi menjadi sia-sia dan semakin mahal dan tidak dapat mendukung penyajian pelaporan keuangan yang handal. (Anggraeni dan Riduan, 2014).

Teori keagenan telah di praktikan pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun daerah. Teori agensi dapat menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pembuat laporan keuangan dan pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Agen yang membuat laporan keuangan memiliki keuangan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya sehingga bisa melakukan kecurangan tanpa di ketahui oleh pihak principal. Pihak principal menginginkan laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan apa adanya supaya dia tahu apa saja yang terjadi dan pengeluaran atau pemasukan yang ada di

dalam pemerintahannya. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal atas pengelolaan keuangan daerah yang dibuat sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manager tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *Steward* dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai hakikat sifat – sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dan bertanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran untuk kepentingan publik dan *stakeholder*. Teori *Stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik. Akuntansi sebagai penggerak berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata.

Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas, informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya, laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika laporan keuangan yang diinformasikan disajikan dengan valid dan dapat diandalkan.

Kabupaten Musi Rawas sistem khususnya di Organisasi Perangkat Daerah sumber daya manusia yang menggunakan

teknologi berbasis akrual belum memahami benar bagaimana cara membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sehingga laporan yang dihasilkan masih sering terjadi kesalahan. Berdasarkan temuan dan fenomena yang telah diuraikan diatas dapat dilihat adanya kontradiksi atau perbedaan antara temuan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pada dasarnya merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan agen. Prinsipal mengontrak agen untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada agen sedangkan agen berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bertanggungjawab atas tugas yang dibebankan kepadanya (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) asumsi yaitu (a) asumsi tentang sifat manusia; (b) asumsi tentang keorganisasian dan (c) asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self interest*) memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai resiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian menekankan adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas. Asimetri informasi (*asymmetric information*) merupakan informasi yang tidak seimbang karena perbedaan distribusi informasi antara prinsipal dan agen (Giraldi, 2001).

Teori keagenan telah di praktikkan pada sektor publik khususnya pemerintah pusat maupun daerah. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya secara sendirian, sehingga pemerintah memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya. Pembuatan anggaran menjadi mekanisme yang penting untuk alokasi sumber daya karena adanya keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah.

Teori agensi dapat menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pembuat laporan keuangan dan pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Agen yang membuat laporan keuangan memiliki keuangan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya sehingga bisa melakukan kecurangan tanpa di ketahui oleh pihak principal. Pihak principal menginginkan laporan keuangan yang dihasilkan sesuai sesuai dengan apa adanya supaya dia tahu apa saja yang terjadi dan pengeluaran atau pemasukan yang ada di dalam pemerintahannya. Hal tersebut membuat adanya perbedaan antara kepentingan agen dan principal.

Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut *nexus of contract*. Agen berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh principal kepadanya. Teori ini memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agen.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban agen kepada principal atas pengelolaan keuangan daerah yang

dibuat sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Semakin menguatnya tuntutan terhadap lembaga-lembaga publik untuk mewujudkan akuntabilitas sektor publik, mengharuskan pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Teori Stewardship

Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manager tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran mereka untuk kepentingan organisasi. Menurut (Donalson dan Scannel, 1993:105) teori *Stewardship* didefinisikan sebagai suatu situasi dimana manager tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan prinsipal. Teori ini berasumsi bahwa manajemen sebagai pihak yang berintegritas tinggi, memiliki kejujuran dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tindakan sebaik-baiknya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Dalam teori ini manajer lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Berdasarkan kepada asumsi bahwa teori *Stewardship* yang menyatakan bahwa manager akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang efektif bagi kepentingan organisasi dan bekerja berdasarkan pemikiran bahwa keuntungan manager atau *Steward* dan pemilik atau principal berasal dari perusahaan yang kuat secara organisasi dan secara ekonomi.

Teori *Steward* dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenal hakikat sifat – sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dan bertanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran untuk kepentingan publik dan *stakeholder*. Selanjutnya teori *Stewardship* juga mengasumsikan bahwa terdapat

hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik, *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kinerja organisasi, kepentingan pemilik. Asumsi yang terpenting adalah bahwa *Steward* yang dalam hal ini adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik.

Teori *Stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik. Akuntansi sebagai penggerak berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, *principal* semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan pemilik sumber daya (*capital supplier/principal*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*Steward* = manajemen) yang lebih *capable* dan siap. Kontrak hubungan antara *Stewards* dan *Principals* atas dasar kepercayaan (amanah = *trust*), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah teori *Stewardship*.

Dikaitkan dengan manfaat kualitas laporan keuangan dengan teori *Stewardship* yaitu informasi keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas, berdasarkan teori, ada hubungan positif antara kualitas laporan keuangan pemerintah dengan dengan teori *Stewardship*. Pemerintah yang bertindak sebagai manajer mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Pemerintah dituntut memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dengan demikian

manajemen dilingkungan pemerintah lebih dominan bertindak sebagai *Steward*.

Berdasarkan ketentuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Presiden selaku kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Presiden dipilih oleh rakyat. Presiden sebagai kepala pemerintahan mengkuasakan kepada Menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. serta menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran dan pengguna barang kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya selaku manager wajib memberikan laporan pertanggung jawaban yang tertuang dalam APBN kepada rakyat dalam bentuk LKPP yang telah diaudit oleh BPK. Berdasarkan teori *stewardship* ini, kinerja kuasa pengguna anggaran dan akan dinilai dalam laporan pertanggungjawabannya kepada DPR tentang keberhasilan program dan kebijakannya yang tercermin pada realisasi APBN serta opini LKPP yang diperoleh pemerintah .

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi semakin lama semakin meningkat. Teknologi Informasi (TI) ini berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu proses pengolahan dan penyebaran data dengan memanfaatkan alat perangkat komputer dan telekomunikasi untuk kegiatan yang dilakukan seseorang. Teknologi informasi di Indonesia ikut berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin modern. "Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan *hardware*, *software*, teknologi penyimpanan data, dan teknologi komunikasi" (Laudon, 2006: 174).

Berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju akan memudahkan penyusunan laporan

keuangan dan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan yang lebih akurat dan tepat serta memiliki kemampuan menyimpan data yang lebih besar. Pekerjaan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, akan tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi ini akan membutuhkan dana yang lebih besar.

Menurut Indriasari dan Ertambang (2008), teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimilikimanusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari nilai informasi yang dihasilkan. Dengan bantuan komputer pengolahan data bisa diatur sedemikian rupa sehingga informasi dapat disajikan tepat waktu dan dengan biaya yang masih di bawah manfaat itu sendiri. Dengan kata lain, kita bisa mengatur pengolahan data sehingga manfaat ekonomis sebuah informasi dapat diperoleh secara maksimal (Winingdyaningrum dan Rahmawati, 2010:10).

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang lebih andal karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material (Primayana, 2014).

Husna (2017) berpendapat bahwa pemanfaatan informasi dapat diartikan

sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Ika (2017) menyatakan bahwa indikator pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Proses kerja secara elektronik, dimaksud untuk mengetahui apakah instansi memiliki komputer yang cukup dan apakah proses kerja sudah dilakukan secara elektronik.
2. Pengolahan dan penyimpanan data keuangan, dimaksud untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan data oleh instansi.
3. Pengolahan informasi dengan jaringan internet, dimaksud untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Informasi dengan memanfaatkan internet.
4. Sistem Manajemen, dimaksud untuk mengetahui informasi yang dihasilkan memiliki integrasi.
5. Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer, dimaksud untuk mengetahui jadwal pemeliharaan barang elektronik, perbaikan pada peralatan yang rusak dan penggunaan antivirus pada komputer.

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan jelas sangat nyata sejak awal proses penganggaran hingga pertanggungjawaban laporan keuangan. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi keuangan, tidak ada kegiatan umumnya yang ditingkatkan atau dikurangkan.

Sistem informasi akuntansi tetap mengumpulkan, memproses dan menyimpan data dan setiap proses akuntansi ini dapat mengurangi penggunaan kertas. Sistem informasi juga mengontrol keakuratan. Dan hal terpenting segala tahapan proses akuntansi dapat dilakukan secara otomatis. Output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Jurnal dkk (2002:87) bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Keterandalan Laporan Keuangan

Menurut PP 71 Tahun 2010, Keterandalan laporan keuangan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut yaitu :

1. Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Pelaporan keuangan sebagai sistem nasional merupakan hasil dari proses

perekayasaan akuntansi. Pelaporan keuangan memiliki tujuan yang bersifat fungsional. Tujuan fungsional pelaporan keuangan adalah masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi dari masing-masing individu didalamnya. Tujuan individu tidak dapat diamati sedangkan tujuan fungsional dapat diidentifikasi dengan mengamati konsekuensi-konsekuensi dari kegiatan masyarakat yang nyata terjadi.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey. Penelitian kuantitatif dengan metode survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

Desain penelitian ini adalah kausal yaitu untuk melihat hubungan berbagai variabel penelitian dan berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain (Sekaran, 2009). Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dan dihimpun langsung oleh peneliti dari responden melalui kuesioner dengan pernyataan tertutup. Data primer yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dari Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas responden sebanyak 34 OPD.

Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, karena data yang dikumpulkan berupa data primer. Cara memperoleh data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai pada OPD Kabupaten Musi Rawas dengan pengiriman langsung kepada pihak yang bersangkutan. Jenis data

bersumber pada informasi yang diberikan oleh bagian keuangan pada OPD Kabupaten Musi Rawas Teknik analisis data dalam menguji hipotesis penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel dan untuk melihat pengaruh secara parsial dan simultan. Persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah

α = Konstanta

X1 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X2 = Sistem Berbasis Akrua

β_1, β_2 = koefisien regresi

e = error

Hasil dan pembahasan

Hasil pengujian hipotesis

Hasil Uji Kualitas Data

Jumlah kuesioner yang didistribusikan seluruhnya berjumlah 100 kuesioner dan yang diterima kembali 70 kuisisioner dan 70 kuisisioner ini semua dapat diolah.

Hasil Uji Validitas

Dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa *Pearson correlation* untuk setiap item butir pernyataan dengan skor total variabel pemanfaatan teknologi informasi (X1), penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua (X2), dan keterandalan laporan keuangan adalah signifikan pada tingkat signifikansi 0,01. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa setiap item indikator instrumen untuk pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua dan keterandalan laporan keuangan tersebut valid.

No	Variabel	Pearson Correlation	Signifikan	Keterangan
1	Pemanfaatan teknologi informasi	0,156 s/d 0,775	0,005-0,000	Valid
2	Keterandalan laporan keuangan	0,698 s/d 0,789	0,000-0,000	Valid

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji *One Shot*, artinya satu kali pengukuran saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lainnya atau dengan kata lain mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Dari tabel menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha (á)* untuk masing-masing variabel adalah lebih besar dari 0,70, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa item-item instrumen untuk masing-masing variabel adalah reliabel.

Variabel	Cronbach's Alpha Based on standardized Items	N of Items
Pemanfaatan teknologi informasi	0,741	8
Keterandalan laporan keuangan	0,789	4

Uji Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	Rentang Teoritis	Rentang Aktual	Rata-rata Teoritis	Rata-rata Aktual	Standar Deviasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X)	8-40	20-40	24	33,49	3,496
Keterandalan Laporan Keuangan (Y)	4-20	14-20	12	16,49	1,282

Dari tabel tersebut dapat diketahui informasi tentang standar deviasi, rata-rata serta rentang teoritis masing-masing pertanyaan dan rentang aktual dari masing masing responden. Secara rinci akan dijelaskan berikut ini:

Variabel teknologi informasi seperti terlihat pada tabel rata-rata aktual (*mean*) tingkat kualitas sistem informasi untuk seluruh responden adalah 33,49 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 24. Rata-rata aktual lebih tinggi daripada rata-rata teoritis, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sudah baik, responden merasakan bahwa teknologi informasi sudah berkualitas sesuai dengan perkembangan dunia teknologi digital saat ini. Standar deviasi menunjukkan ukuran variansi data terhadap *mean* (jarak rata-rata data terhadap *mean*). Standar deviasi untuk variabel teknologi informasi adalah sebesar 3,496. Hal ini berarti bahwa variansi data relatif lebih kecil karena standar deviasi lebih kecil dari *mean*.

Variabel keterandalan laporan keuangan seperti terlihat pada tabel rata-rata aktual (*mean*) tingkat keterandalan laporan keuangan untuk seluruh responden adalah 16,49 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 12. Rata-rata aktual lebih tinggi daripada rata-rata teoritis sehingga menunjukkan bahwa rata - rata kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah tinggi. Responden cenderung sudah memahami betul pentingnya suatu keterandalan pada laporan keuangan. Standar deviasi menunjukkan ukuran variansi data terhadap *mean* (jarak rata-rata data terhadap *mean*). Standar deviasi untuk variabel kinerja pengelola keuangan adalah sebesar 1,282. Hal ini berarti bahwa variansi data relatif lebih kecil karena standar deviasi lebih kecil dari *mean*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model *regresi*, variabel *dependen* dan *independen* keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji *kolmogorov smirnovZ*. *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

Variabel	Sig	Keterangan
Understandarized Residual	0.031	Tidak Normal

Hasil uji *kolmogorov smirnovZ* didapatkan nilai signifikan lebih kecil dari pada 0,05 ($0,031 < 0,05$). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa sebaran data tidak menunjukkan penyimpangan dari kurva normalnya, yang berarti bahwa sebaran data telah memenuhi asumsi normalitas, namun karena data dalam penelitian ini relatif besar (lebih besar 30), maka diasumsikan data terdistribusi normal berdasarkan *central unit theorim*.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji Multikolinearitas disajikan

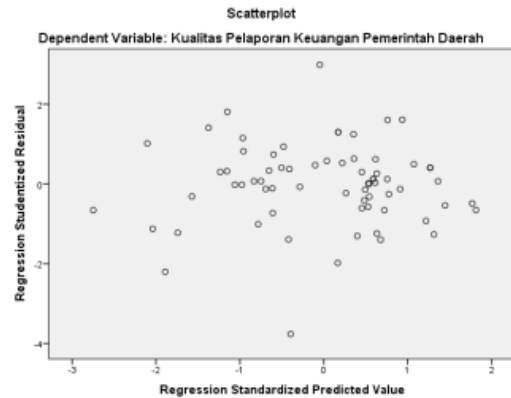
Variabel Independen	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Pemanfaatan teknologi informasi	0,950	1,053	Tidak ada multikolinieritas
Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual	0,836	1,000	Tidak ada multikolinieritas

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa angka *tolerance* dari variabel *independen* pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi berbasis akrual mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel *independen* yang nilainya lebih dari 95%.

Sementara itu, hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama. Tidak ada satupun variabel *independen* yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam model *regresi* tidak terjadi multikolinieritas antar variabel *independen* tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan metode grafik plot *Regression Standardized Predicted Value* dengan *Regression Studentized Residual*. Metode grafik plot dilakukan dengan cara mendiagnosa diagram residual plot (*Studentized*) dibandingkan dengan hasil produksi. Jika titik-titik sebar membentuk pola tertentu dan teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas.



Berdasarkan grafik scatterplot tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model *regresi*.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan regresi berganda. Tabel berikut adalah hasil pengujian hipotesis. Berikut ini adalah hasil pengujian regresi berganda dan output tabel pengujian dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 23,0 dalam bentuk output ANOVA (uji F), model summary serta coefficient (uji t) seperti pada tabel sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis

NO	KETERANGAN	Keefisien Regresi	Nilai t		Hasil
			Nilai	sig	
1	Pemanfaatan teknologi informasi	0.19	0.429	0.669	Ditolak
2	F- Hitung		0.212	0,809	
3	R Square	0,004			
4	Adjusted R Square		0.0312		

Sumber : Data primer diolah, 2020

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa diperoleh nilai F hitung sebesar 0,212 dengan probabilitas 0,809. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model *regresi* tidak dapat digunakan untuk memprediksi keterandalan laporan keuangan atau dapat

dikatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, penerapann standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara simultan tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan.

Uji *Adjusted R Square*

Hasil uji koefisien determinasi besarnya *adjusted R Square* adalah 0,0312. Nilai ini menunjukkan bahwa 31,20 % variasi keterandalan laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel *independen* yaitu pemanfaatan teknologi informasi sedangkan sisanya 68,80 % dijelaskan oleh faktor lain di luar model. .

Uji Parsial (Uji t)

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada pengelola keuangan tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan dikonfirmasi pada tabel 4.8. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel pemahaman teknologi informasi adalah 0,19 dan nilai t hitung 0,429.

Nilai koefisien *regresi* ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* sebesar 0,669, sehingga perubahan atau variasi variabel pemahaman teknologi informasi akan diikuti oleh variasi keterandalan laporan keuangan. Hasil pengujian ini menginterpretasikan bahwa variabel pemahaman teknologi informasi pada pengelola keuangan tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan pada taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain **hipotesis ditolak**.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dan uji statistik induktif dalam penelitian ini, diperoleh hasil sebagai berikut:

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Laporan Keuangan

Hipotesis pertama bertujuan untuk melihat variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan organisasi perangkat daerah. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan

keuangan organisasi perangkat daerah, ini berarti H1 ditolak pada penelitian ini.

Seharusnya di era digital saat ini bisa memanfaatkan teknologi informasi yang sudah berkembang,. Pekerjaan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, akan tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi ini akan membutuhkan dana yang lebih besar dan sumber daya manusia yang lebih kompeten.

Teknologi Informasi ini dapat dioperasikan dengan menggunakan seperangkat komputer. Alat bantu tersebut berperan sebagai pengolah data yang mampu mendapatkan, menyusun, memproses, menyimpan, dan mengelompokkan data lebih baik dari yang manusia mampu lakukan. Teknologi informasi juga berfungsi sebagai media penyebar data yang bertujuan agar masyarakat luas dapat lebih mudah mengaksesnya.

Adapun manfaat lainnya dari penggunaan teknologi informasi pada OPD adalah untuk mempersingkat suatu proses penyelesaian laporan keuangan dengan cara melipatgandakan kinerja manusia dan mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak mampu dilakukan manusia. Seharusnya dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju akan memudahkan penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan informasi keuangan karena memiliki kekuatan yang lebih akurat dan tepat serta memiliki kemampuan menyimpan data yang lebih besar, Tetapi dalam hal ini pemanfaatan teknologi informasi belum maksimal digunakan. Padahal jika bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan baik serta berkualitannya semakin mudah mewujudkan suatu kualitas keterandalan pada laporan keuangan.

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan laporan keuangan belum mampu mendukung teori *stewardship*. Teori *stewardship* dikaitkan dengan manfaat kualitas laporan keuangan dengan yaitu informasi keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas, berdasarkan teori, ada hubungan positif antara kualitas

laporan keuangan pemerintah dengan dengan teori ini. Pemerintah yang bertindak sebagai manajer mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Seharusnya dengan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan jelas sangat nyata bisa dilakukan sejak awal proses penganggaran hingga pertanggungjawaban laporan keuangan. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi keuangan, tidak ada kegiatan umumnya yang ditingkatkan atau dikurangkan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Pramudiarta (2015) dan Prapto (2010) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil ini tidak sejalan dengan Darwanis (2009) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan. Salah satu kualitas laporan keuangan adalah andal. Hal ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Komarasari (2016) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Kewajiban Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Semakin banyak intensitas dalam menggunakan teknologi informasi dan meninggalkan metode konvensional, maka akan semakin tercipta laporan keuangan yang andal di lingkup Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi berbasis akrual terhadap keterandalan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan. Seharusnya di perkembangan era digital saat ini bisa melakukan pemanfaatan teknologi dengan baik, jika dilihat dari aspek pemanfaatan perangkat lunak pengelola keuangan daerah, penggunaan komputer dalam melaksanakan fungsi akuntansi, memanfaatkan jaringan internet sebagai penghubung antar unit kerja. Dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan serta memahami dan menguasai teknologi komputer mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan berupa penyajian laporan keuangan. jika pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dengan maksimal dalam penyusunan laporan keuangan akan menghasilkan pelaporan keuangan yang andal

Implikasi Penelitian

Berhasil dikonfirmasi atas semua hipotesis yang ada dalam penelitian ini membawa beberapa implikasi dari penelitian ini adalah :

1. Bagi lingkungan Pemkab Musi Rawas. agar pemanfaatan

teknologi informasi yang sudah tersedia dalam hal pengelolaan data keuangan dengan menggunakan *software* sesuai peraturan lebih ditingkatkan lagi dan perlu meningkatkan pendampingan dalam operasional sistem perangkat lunak pemerintah daerah sehingga meminimalisir kesalahan dan laporan keuangan yang dihasilkan semakin andal. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lagi variabel penelitiannya, hal ini akan mendorong arah riset selanjutnya untuk lebih spesifik meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterandalan laporan keuangan. Menambahkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan selain keterandalan seperti ketepatanwaktuan laporan keuangan, pengendalian internal.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, adapun keterbatasan itu yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini tidak melakukan wawancara secara langsung terhadap responden, sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan kuesioner saja.
2. Populasi pada penelitian ini hanya difokuskan pada pegawai bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada organisasi perangkat daerah (OPD).
3. Penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penyempurnaan terhadap kuesioner serta skala yang digunakan pada variabel

penerapan standar akuntansi berbasis akrual.

Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan penelitian serupa di masa yang akan datang, yaitu :

1. Untuk penelitian selanjutnya dalam pengumpulan data sebaiknya menambahkan metode wawancara secara langsung terhadap masing-masing responden sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena demikian dapat menghindari responden menjawab dengan tidak objektif atau bahkan diisi oleh orang lain.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan agar memperhatikan responden terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D.T. dan Riduan, A. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol.3 No.3.
- Arens, A.A, Elder R. J, dan Beasley, M.S. (2014). *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi Kelima Belas Jilid 1. Alih Bahasa: Herman Wibowo dan Tim Perti. 2014, Jakarta : Erlangga.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Ihtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS)*. Semester I Tahun 2014.



- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Byars, L, dan Rue, L.W. (1997). *Human Resources Management*, 5th Ed, Irwin, Chicago. Flippo, Edwin B.(1982), *Personnel Management*, McGraw- Hill, USA.
- Darwanis dan Mahyani, Dwi D. (2009). Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah dan Risert Akuntansi*, Vol 2 No 2 Juli 2009, Hall 133-151.
- Davis, F. D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. *MIS Quarterly*, 13, 319-340.
- Faristina, Rosalin. (2011). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Studi pada BLU di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Fikri, Inapty dan Martiningsih. (2015). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating*. Simposium Nasional Akuntansi 18. Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi 3. BP Undip. Semarang.
- Gilardi, Fabrizio. (2001). Principal-agent models go to Europe: *Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation*. Paper presented at the ECPR General Conference, Canterbury (UK), 6-8 September 2001.
- Harahap, Sofyan Safri, (2002). *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husna, Tissa Nurul. (2017). Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan peran inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal. JOM Fekom, Vol.4 No.1*
- Hutapea, Parulin dan Nuriana, Thoha. (2008). *Kompetensi Plus Teori, Desain Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Indriasih, D. (2014). The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol.5, No.20 ISSN 2222-2847.



- Indriasari, desi dan Ertambang Nahartyo. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir) *Jurnal SNA*. Pontianak.
- Irwan, D. (2011). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Tesis*. Universitas Negeri Padang.
- Jensen, M. C., and W. H. Meckling. (1976) . Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. 3(4): 305-360.
- Jogiyanto. (2007). *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Penerbit Andi : Jogjakarta.
- Jurnali, Teddy dan Bambang Supomo. (2002). Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas- Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 5 No. 2 Hal. 214-228.
- Karmila. Tanjung, A.R. dan Darlis, E. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Sorot* Vol. 9 No.1 Lembaga Penelitian Universitas Riau. ISSN 1907- 364 X.
- Kristiawati, Endang. (2015). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat. *Akuntabilitas* Vol. III No.3 Desember 2015 Universitas Panca Bhakti Pontianak. ISSN 1979-858X.
- Mahaputra, Rahma Upabayu I.P. dan Putra, I.W. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana 8.2 (2014) 230-244.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik..* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta
- Michael C. Jensen, William H. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structur. *Journal of Financial Economic*. October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Ningtyas, Eka Pravitasari dan Widyawati, Dini. (2015). Pengaruh Efektivitas Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan



- Keuangan Pemerintah Daerah.
Jurnal Ilmu & Risert Akuntansi
Vol.4 No 1.
- Nordiawan, D. dan Hertianti. A. (2010).
Akuntansi Sektor Publik Edisi 2
Jakarta: Salemba Empat.
- Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh,
Imam. (2008). Pengaruh
Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan. *Jurnal
Ekonomi Bisnis*, No. 1 Vol. 13,
April 2008, hal 48-58
- Otley, DT. (1980). The Contingency
Theory of Management
Accounting: Achievement and
Prognosis. *Accounting and
Organization Society* 5(4) 413-
428
- Republik Indonesia. (2003). Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang *Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008
Perubahan atas Undang Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan
Pemerintah No.56 Tahun 2005.
*Sistem Informasi Keuangan
Daerah*.
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan
Pemerintah No.8 Tahun 2006.
Tentang *Pelaporan Keuangan
Dan Kinerja Instansi
Pemerintah*.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun
2010. *Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang
*Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2011). Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
*Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah*.
- Riyanto dan P. Agus. (2015). *Akuntansi
Pemerintah Daerah Berbasis
Akrual*. Yogyakarta : Pustaka
Pelajar.
- Ruki. Ahmad.S. (2003). *Sumber Daya
Manusia Berkualitas Mengubah
Visi Menjadi Realitas*. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
- Sekaran, Uma. (2011). *Metodologi
Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta:
Salemba empat, edisi 4, buku 2
- Setyowati dan Isthika. (2014). Analisis
Faktor yang Mempengaruhi
Kualitas Laporan Keuangan
Daerah Pada Pemerintah Kota
Semarang. *Proceedings SNEB
2014*.
- Shahwan, Yousef. (2008). Qualitative
Characteristics of Financial
Reporting: A Historical
Perspective. *Journal of Applied
Accounting Research*. 9 (3), pp.
192-202.



- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suarmika, I.G.L. & Suputra, D.G.D. (2016). Kemampuan Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Kapasitas SDM dan Penerapan SIKD pada Kualitas LKPD Kabupaten Karangasem. *EJurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 5, No. 9, pp. 2921-2950
- Stoner J.A.F. (1996). *Manajemen*. Alih Bahasa: Alexander Sindoro dan Bambang Sayaka. Jakarta : PT. Prenhalindo.
- Syaripudin. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. *Jurnal Fokus Bisnis* Vol.14 No.02 Tahun 2014.
- Uma, Sekaran. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On- Wing. (2000). *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.
- Winidyaningrum, C. dan Rahmawati. (2010). *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi*. Simposium Nasional Akuntansi, XIII, Purwokerto.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol.1, No. 1. Hal: 21-37